

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama yang secara langsung menjawab rumusan masalah. Kesimpulan tersebut dirumuskan dari temuan lapangan yang dikombinasikan dengan kajian teoritis, sehingga memberikan jawaban yang sistematis, objektif, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kesimpulan pokok yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:.

1. Strategi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan dalam mencegah pengiriman Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural (PMI-NP) bersifat komprehensif, adaptif, dan integratif, mencakup pendekatan preventif dan represif yang saling melengkapi. Upaya preventif dilakukan melalui pengetatan proses penerbitan paspor dengan sistem *screening* berlapis, pelaksanaan program Pintar Memilih Paspor Aman (PIMPASA) sebagai bentuk edukasi publik, serta pemanfaatan teknologi digital seperti SIMKIM dan M-Paspor guna meningkatkan akurasi dan efisiensi layanan. Pada sisi represif, Kantor Imigrasi Medan aktif melakukan operasi intelijen, penegakan hukum, serta kolaborasi lintas sektor melalui Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sinergi ini mencerminkan bentuk tata kelola migrasi yang berbasis kolaborasi (*collaborative governance*), di mana pencegahan PMI-NP tidak hanya bergantung pada kinerja institusi tunggal, tetapi pada koordinasi sistemik antarinstansi. Strategi ini menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Medan tidak

hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, melainkan juga sebagai aktor strategis dalam sistem perlindungan migran nasional.

2. Hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi Medan dalam pencegahan PMI-NP bersifat struktural, koordinatif, dan sosial-ekonomis. Meskipun strategi yang diterapkan telah memberikan hasil positif di beberapa aspek, masih terdapat kendala berupa terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya integrasi data antar lembaga, serta dominasi jaringan sponsor dan calo yang bersifat masif dan adaptif. Hambatan eksternal seperti ketimpangan ekonomi, minimnya lapangan kerja formal, dan lemahnya tata kelola pasar kerja domestik turut memperkuat dorongan masyarakat untuk menempuh jalur migrasi non-prosedural. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pencegahan PMI-NP tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh sektor imigrasi semata, melainkan membutuhkan pendekatan multi-level governance yang mengintegrasikan dimensi hukum, sosial, dan ekonomi. Diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pembaruan basis data migrasi terpadu, serta reformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional agar upaya pencegahan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut adalah beberapa saran yang diajukan kepada pihak terkait guna meningkatkan efektivitas pencegahan PMI NP:

1. Strategi pencegahan perlu ditegaskan sebagai strategi dua arah yang menyoar instansi terkait sekaligus masyarakat sebagai subjek aktif. Bagi instansi terkait,

diharapkan memperkuat tata kelola, integrasi data, dan sistem pengawasan berbasis teknologi. Bagi masyarakat dan calon PMI, diperlukan program pemberdayaan hukum, ekonomi, dan literasi digital agar mereka mampu menjadi bagian dari sistem pencegahan, bukan hanya objek kebijakan. Pada Kantor Imigrasi kota Medan diharapkan dapat terus memperkuat strategi pencegahan PMI nonprosedural dengan memperluas jangkauan edukasi masyarakat melalui inovasi media komunikasi yang lebih interaktif dan adaptif, misalnya pemanfaatan platform digital yang mudah diakses oleh masyarakat pedesaan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi seperti SIMKIM dan M- Paspur perlu terus ditingkatkan, baik dari sisi infrastruktur maupun literasi pengguna, agar proses pelayanan publik semakin transparan dan akuntabel. Kolaborasi dengan instansi lain, khususnya Satgas TPPO, juga perlu diperdalam melalui pembentukan mekanisme kerja terpadu yang lebih sistematis, sehingga efektivitas strategi pencegahan dapat semakin optimal.

2. Untuk mengatasi hambatan, diperlukan penguatan kolaborasi lintas lembaga. Satuan Tugas Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) perlu melakukan evaluasi rutin dan meningkatkan mekanisme koordinasi untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan memastikan sinergi operasional di lapangan. Terakhir, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi jumlah personel maupun keterampilan *profiling*, serta pendekatan holistik dengan mengadvokasi perbaikan tata kelola pasar kerja domestik. Dengan demikian, upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam menekan angka migrasi non-prosedural.

3. Kepada Aparat Penegak Hukum, Koordinasi dalam Satgas TPPO harus ditingkatkan dengan fokus pada penindakan tegas terhadap calo, sponsor, dan sindikat pengiriman PMI ilegal. Hukuman yang lebih berat dan efek jera perlu diterapkan untuk memutus rantai kejahatan ini.



THE
Character Building
UNIVERSITY